

## Positif Covid-19, Panglima TNI Isolasi Mandiri dan Tanpa Gejala

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ini tengah menjalani isolasi mandiri setelah terpapar Covid-19.

Yudo mengatakan, Andika dinyatakan positif pada Senin (28/2).

"Pak Panglima TNI beliau masih isoman, kemarin siang beliau kena kemudian menyerahkan pelaksanaan Rapim TNI-Polri kepada saya," ujar Yudo kepada awak media usai memimpin Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3).

Yudo mengatakan, Andika tanpa gejala. Ia mengungkapkan, sebelum dinyatakan positif Covid-19, Andika

sempat mengecek langsung kesiapan lokasi Rapim TNI-Polri di Mabes TNI.

"Kemarin beliau kan masih meninjau kesiapan ini," imbuhnya.

Diberitakan, Andika diketahui positif Covid-19 setelah Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam agenda ini memberitahukan kepada peserta Rapim. Ia menyampaikan hal ini ketika memberikan sambutan.

"Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut karena beliau baru terkena Covid-19," kata Jokowi dalam sambutannya di lokasi. Akibat terpapar Covid-19, Andika kemudian mempercayakan Yudo untuk mewakilinya memimpin Rapim TNI-Polri. ● mei

## Dirut Utama Karya Diperiksa KPK terkait Korupsi Proyek Kampus IPDN

JAKARTA (IM) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Utama Karya, Budi Harto, terkait kasus korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Rokan Hilir Riau, Selasa (1/3).

Selain Budi, Saksi lain yang dipanggil adalah Direktur Keuangan PT Utama Karya, Hilda Savitri yang sebelumnya sudah dipanggil KPK pada 17 Januari 2022 lalu.

Pelaksana tugas juru bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri mengungkapkan, pemeriksaan Budi dan Hilda untuk melengkapi pemeriksaan tersangka Dudi Jocom.

"Hari ini (Selasa), KPK memanggil dua orang saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN tahap II Rokan Hilir, Provinsi Riau pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011," ujar Ali.

Sebagai informasi, saat ini KPK tengah menyidik kembali dan menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan serta pelaksanaan

pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN tahun anggaran 2011 di sejumlah daerah. Dua di antaranya, di daerah Sulawesi Utara dan Rokan Hilir Riau.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dudy Jocom, dan mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko.

Sementara terkait kasus korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Rokan Hilir Riau, KPK sedikitnya telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka yakni, Dudy Jocom, mantan Kepala Divisi Gedung PT Utama Karya bernama Budi Rachmat Kurniawan (BRK), dan Senior Manager PT Utama Karya bernama Bambang Mustaqim (BMT).

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dalam pembangunan gedung kampus IPDN. Diduga, negara dirugikan sekira Rp34 miliar dari proyek senilai Rp91,62 miliar di Rokan Hilir Riau tersebut. ● han

## KPU akan Batasi 300 Pemilih di Tiap TPS untuk Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, KPU berencana membatasi pemilih hanya 300 orang di tiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.

Pembatasan jumlah maksimal 300 pemilih per TPS bertujuan untuk mengkomodasi durasi bagi tiap pemilih di bilik suara. Ketentuan ini pun sama dengan Pemilu 2019 karena model pemilu tidak berubah.

"Karena durasi lima sampai tujuh menit per pemilih untuk memilih lima jenis surat suara, kalau 300 pemilih masih terakomodasi dalam durasi enam jam waktu pemungutan suara di TPS. Ini nanti akan kami pertahankan di Pemilu 2024 karena modelnya masih sama, yaitu pemilu serentak dengan lima surat suara," ujar Hasyim dalam "Kompas XYZ Forum" di Jakarta, Selasa (1/3).

Seperti pemilu 2019 lalu, pada 2024 ng, mendat pemilu presiden dan wakil presiden digelar serentak dengan pemilu legislatif. Pemilih memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu 2024 ini akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara itu, lanjut Hasyim, alokasi pemilih untuk Pilkada 2024 akan dibatasi 500 pemilih di tiap TPS. Kemudian, undangan kepada para pemilih untuk hadir di TPS diberikan jeda waktu sesuai nomor.

Hasyim mengatakan, aturan ini sudah diterapkan saat Pilkada 2020 untuk menghindari kerumunan orang dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Dengan asumsi pandemi masih terjadi di Indonesia pada 2024, aturan ini akan diberlakukan kembali. Adapun Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Ini masih akan kami adopsi kembali dan digunakan dalam Pilkada 2024," katanya. ● mei



### AKSI BURUH DI BEKASI

Buruh berunjuk rasa di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/3). Mereka menolak Peraturan Menteri no.2 tahun 2022 yang mengatur persyaratan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 tahun karena dinilai memberatkan dan merugikan para buruh.

# Polhukam

FOTO/ANT



### KEPPRES TANGGAL 1 MARET MENJADI HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA

Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan HB X, membacakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penegakan Kedaulatan Negara di Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dimana dalam sejarah bangsa Indonesia tanggal 1 Maret 1949 terjadi serangan umum terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta.

## Dijadikan Alasan Penundaan, Anggaran Pemilu 2024 Diusulkan Disesuaikan Kembali

Anggaran Rp86,2 triliun dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024. Sebab itu, pimpinan Komisi II DPR mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta agar anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

"Soal anggaran, DPR, ya kita cuman minta ke KPU, anggarannya disesuaikan dengan situasi pandemi lah," kata Saan dalam acara Kompas XYZ Forum di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (1/3).

Politikus Partai Nasdem tersebut khawatir, besarnya anggaran pemilu dijadikan dalih oleh sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Padahal, Saan menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali.

"Jangan sampai itu dijadikan alasan (menunda pemilu), anggarannya besar dijadikan alasan, padahal ini sudah amanat Undang-Undang Dasar," kata Saan.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perancangan masa jabatan presiden.

## Cak Imin Dideklarasikan sebagai Calon Presiden 2024 di Makassar

MAKASSAR (IM) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 oleh sejumlah pihak di Universitas Indonesia Timur (UIT), Makassar, Selasa (1/3).

Deklarasi ini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri alumni UIT, komunitas pekerja kesehatan Sulawesi Selatan, dan tim sukses H Haruna, anggota Komisi IX DPR RI.

Cak Imin — panggilan Muhaimin Iskandar — dideklarasikan berpasangan dengan mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman sebagai calon wakil presiden.

"Kami tim pemenang Haji Haruna, bersama koalisi komunitas pekerja kesehatan Sulawesi Selatan, dan 40.000 alumni Universitas Indonesia Timur Makassar menyatakan sikap dan dukungan kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden Republik Indonesia," ujar deklarator di Universitas Indonesia Timur, Selasa (1/3).

"Dan Bapak Amran Sulaiman sebagai wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah SWT meridai deklarasi pada hari ini," katanya menambahkan.

Cak Imin mengaku terharu

baliknya, kalau ternyata KPU belum siap atau dipaksakan kan juga tidak bagus," kata Baidowi dalam diskusi virtual PP GMP bertepatan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3).

Pria yang akrab disapa Awiek itu menyroti soal kesiapan KPU, terutama menyangkut persiapan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 84 triliun. Ia menilai anggaran itu cukup besar, bahkan empat kali lipat dari Pemilu 2019.

Awiek menilai apabila anggaran tersebut digunakan untuk Pemilu 2024, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi yang tengah sulit saat ini akibat pandemi. Untuk itu, dia menilai wajar ada usulan agar Pemilu 2024 sebaiknya ditunda.

"Cukup besar sekali dan kalau dikaitkan tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin maupun Pak Zulkifli Hasan dan juga dulu pernah disampaikan Pak Bahli, kaitannya dengan kondisi ekonomi tentu anggaran Rp 84 triliun itu bukan jumlah yang sedikit gitu," jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR itu melanjutkan, sebaliknya, apabila anggaran tersebut dapat diturunkan, maka tentu bisa diterima karena tidak memberatkan perekonomian nasional.

"Sehingga pemilunya lanjut. Tapi, kalau kemudian dianggap memberatkan tentu akan ada perspektif yang berbeda di antaranya meminta pemilunya ditunda, karena alasan pandemi Covid, ekonomi belum pulih dan semacamnya," kata Awiek.

Di sisi lain, Awiek men-

gungkapkan bahwa tantangan berat penundaan pemilu yakni wacana tersebut bertabrakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dalam UUD 1945 jelas diatur bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali.

Kendati demikian, Awiek

mengatakan wacana tersebut bisa saja terealisasi jika berkaca pada tuntutan politik.

"Yang sebelumnya inkonstitusional ataupun tidak inkonstitusional akan menjadi konstitusional, akan menjadi sah ketika terjadi amendemen konstitusi," ujarnya. ● mei



### KARANTINA PPLN DIPERSINGKAT

Calon penumpang pesawat internasional mengantre di loket lapor diri di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (1/3). Pemerintah memberlakukan kebijakan karantina selama tiga hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster mulai hari ini (1/3).

## Usut Kasus Suap, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Tulungagung

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pekerjaan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

Selain Adib, penyidik KPK juga memanggil empat saksi lainnya, di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, menjelaskan, Adib dan empat saksi lainnya diperiksa di kantor Polres Tulungagung, Selasa (1/3).

"Hari ini, pemeriksaan saksi Tipikor terkait proyek pekerjaan Pemda Kabupaten Tulungagung. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Tulungagung, Jl. Ahmad Yani Timur No. 9, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur," ujar Ali.

Selain Adib dan Agus, tiga saksi yang dipanggil merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak swasta. Ketiga saksi tersebut adalah pihak yang terlibat pada proyek pekerjaan pemda di Kabu-

paten Tulungagung.

Dua saksi pensiunan PNS yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung, Sutrisno dan mantan Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Agung 2014-2018, Sukarji. Kemudian, pihak swasta yang diperiksa sebagai saksi ialah Sony Sandra.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono dijerat dua pasal sekaligus, yakni terkait suap dan gratifikasi.

Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Penerimaan itu diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018. Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha. ● mei

POWER AUCTION				LELANG OTOMOTIF		TERBUKA UNTUK UMUM	
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	SYARAT & KETENTUAN LELANG:			
Selasa - Rabu, 08 - 09 Maret 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 10 Maret 2022	11.00 s/d Selesai	1. Pemikat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar: - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPL MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPL MOTOR			
Selasa - Rabu, 15 - 16 Maret 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 17 Maret 2022	11.00 s/d Selesai	2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (For C&T)			
Selasa - Rabu, 22 - 23 Maret 2022	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 24 Maret 2022	11.00 s/d Selesai	3. Uang Jaminan dan pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT Power Assetindo Selaras A/C no. 5719999971 di BCA cab. Kyai Caringin, Jakarta Pusat			
LOKASI OPEN HOUSE & LELANG				4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan menang dan diwajibkan menyerahkan uang jaminan akan hangus			
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.08, Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan				5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Power Assetindo Selaras, telp : 0212 2127 1851 (Hudi) atau melalui email : yudi.darmawan@power-auction.id			
				Jakarta, 2 Maret 2022 PANITIA LELANG			

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT. TUNAS INTERMODA SEJAHTERA (DALAM LIKUIDASI) DAN BATAS WAKTU PENGAJUAN TAGIHAN BAGI KREDITUR	
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT TUNAS INTERMODA SEJAHTERA (Perseroan), pada tanggal 25-02-2021 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua), dengan Akta nomor 07 (tujuh).	
para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), sekaligus menunjuk Tuan ICHSAN RACHMANSYAH sebagai likuidator yang akan melakukan pemberesan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban Perseroan kepada pihak lain.	
Pihak yang berkepentingan dan/atau para kreditor yang mempunyai tagihan kepada Perseroan, mohon disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak pengumuman ini, ditunjukkan kepada:	
TIM LIKUIDASI	
Demikian Pengumuman ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.	
Tim Likuidasi PT TUNAS INTERMODA SEJAHTERA	